

**ANALISIS PENGUNGKAPAN *CORPORATE
GOVERNANCE* BERBASIS INTERNET OLEH
PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA
TAHUN 2010**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

**MOHAMMAD FAJRUL FALAH
NIM. C2C007081**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Mohammmad Fajrul Falah
Nomor Induk Mahasiswa : C2C007081
Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi

Judul Sekripsi : **ANALISIS PENGUNGKAPAN
CORPORATE GOVERNANCE
BERBASIS INTERNET OLEH
PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA
TAHUN 2010**

Dosen Pembimbing : Drs. H. Tarmizi Achmad, MBA, Ph.D, Akt

Semarang, 19 September 2011

Dosen Pembimbing

(Drs. H. Tarmizi Achmad, MBA, Ph.D, Akt)

NIP. 19550418 198603 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Mohammad Fajrul Falah
Nomor Induk Mahasiswa : C2C007081
Fakultas/Jurusan : Ekonomi / Akuntansi
Judul Skripsi : **Analisis Pengungkapan *Corporate Governance*
Berbasis Internet Oleh Perusahaan Publik di
Indonesia Tahun 2010.**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 4 Oktober 2011

Tim Penguji :

1. Drs. H Tarmizi Achmad, MBA, Ph.D, Akt (.....)
2. Dr. Endang Kiswara, MSi, Akt (.....)
3. Drs. Dul Mu'id, Msi, Akt (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Mohammad Fajrul Falah menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **“Analisis Pengungkapan *Corporate Governance* Berbasis Internet oleh Perusahaan Publik di Indonesia Tahun 2010”**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 12 September 2011

Yang membuat pernyataan,

Mohammad Fajrul Falah

NIM. C2C007081

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Analisis Pengungkapan *Corporate Governance* Berbasis Internet Oleh Perusahaan Publik di Indonesia Tahun 2010”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat banyak pihak yang berperan memberikan bimbingan, arahan, saran dan kritik, serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Mohamad Nasir, MSi, Akt, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah memberikan dedikasi kepada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
2. Bapak Drs. H. Tarmizi Achmad, MBA, Ph.D, Akt selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan senantiasa sabar serta ikhlas dalam memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Marsono, SE, M.Adv. Acc. Akt selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam studi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

5. Seluruh karyawan Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
6. Ibuku tercinta yang selalu berjuang dan berdoa serta memberikan dukungan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Almarhum Bapak, hanya ini yang dapat kulakukan, semoga bapak bangga dengan hasil sementara yang telah dicapai. Saudara-saudaraku Yuli Baroroh, Amalia Rohmah, dan Akmal Zam Zam atas dukungannya yang tiada henti kepada penulis.
7. KH. Dzikron Abdullah, Pengasuh Pon Pes Addainuriah 2 atas ilmu, doa dan teladan kepada penulis.
8. Ririn Dwi Anggraini (Pen Pen) yang selalu dengan sabar mendampingi, memberikan semangat serta meluangkan waktu dan pikiran buat Penulis.
9. Gajebo Crue:Arie, Amel, Kebo, Tegar, Adi,Irfan, Nazila, Nopia yang selalu memberi kehangatan bersaudara. Perjalanan dan petualangan bersama kalian akan selau Penulis rindukan.
10. F4 (Panggah, Jiwo, Ajis) yang setia menemani tour dalam dan luar kota.
11. Hari U, Hari S, Bang Jack, Bebek, Prima, Fika, Meyung, Rini, yang memberi semangat dan inspirasi.
12. Seluruh anak Akuntansi 2007 yang selalu menginspirasi Penulis. Yang pada akrab ya!!
13. Wong Kebumen Beriman, Kalipoh, Yoyon, Hoho, Memet, dan Teman-teman IMAKE atas dukungan kopinya. Kopimu kopiku, Ududmu Ududku.

14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih telah membantu proses penulisan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna untuk itu saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan penelitian ini. Penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat untuk pihak-pihak yang membutuhkan.

Semarang, 8 September 2011

Penulis

Mohammad Fajrul Falah

NIM.C2C007081

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

Yang terpenting adalah proses saat mencapai sesuatu dan apa yang ada dalam proses itu, bukan hasil dari proses itu. Karena hasilnya adalah mutlak pemberian Allah SWT.

Apapun keadaamu, janganlah kamu berucap “duh”.(**Bapak**)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:
Ibuku tercinta
Almarhum Bapak
Saudaraku (Baroroh, Lia, dan Akmal)
Kekasihku
Sahabatku
Almamaterku

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors that affect corporate governance disclosures in a public company's website in Indonesia. Factors analyzed in this study are the size of the company, ROE, listing age, floating capital, size of the board of commissioners and tipe of auditor.

Collecting data using a purposive sampling method in companies listed in Indonesia Stock Exchange at 2010. A total of 131 companies that are used as samples in this study. The method of analysis of this study used non-parametric test Kruskal-Wallis.

The results of these studied show that there were four variables that affected level of corporate governance disclosures in the company's website. These variables were firm size, listing age, size of board commisioners, and auditing. However, ROE and floating capital did not show significant influence to corporate governance disclosure in company's website.

Key words: corporate governance, internet, disclosure

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *corporate governance* dalam website perusahaan publik di Indonesia. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, ROE, usia *listing*, *floating capital*, dan ukuran dewan komisaris serta audit.

Pengumpulan data menggunakan metode *purposive sampling* terhadap perusahaan terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2010. Sebanyak 131 perusahaan yang digunakan sebagai sampel. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat empat variabel yang mempengaruhi tingkat pengungkapan *corporate governance* di *website* perusahaan. Variabel tersebut adalah ukuran perusahaan, lamanya *listing*, ukuran dewan komisaris, dan audit. Akan tetapi, ROE dan *floating capital* tidak menunjukkan pengaruh terhadap tingkat pengungkapan *corporate governance* di *website* perusahaan.

Kata kunci: corporate governance, internet, pengungkapan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGASAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II TELAAH PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Teori Keagenan	13
2.1.2 <i>Corporate Governance</i>	15
2.1.3 Pengungkapan <i>Corporate Governance</i> Berbasis Internet	19
2.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan <i>Corporate Governance</i>	22

2.1.4.1	Ukuran Perusahaan.....	22
2.1.4.2	<i>Return On Equity</i> (ROE).....	24
2.1.4.3	Umur <i>Listing</i>	24
2.1.4.4	<i>Floating Capital</i>	25
2.1.4.5	Ukuran Dewan Komisaris.....	26
2.1.4.6	Tipe Auditor	26
2.2	Penelitian Terdahulu	27
2.3	Kerangka Pemikiran.....	30
2.3.1	Pengungkapan <i>Corporate Governance</i> dalam <i>Website</i> Perusahaan	30
2.4	Pengembangan Hipotesis	32
2.4.1	Ukuran Perusahaan.....	32
2.4.2	<i>Return On Equity</i> (ROE).....	32
2.4.3	Lamanya <i>Listing</i>	33
2.4.4	<i>Floating Capital</i>	34
2.4.5	Ukuran Dewan Komisaris.....	35
2.4.6	Tipe Auditor	36
BAB III	METODE PENELITIAN	37
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	37
3.1.1	Variabel Penelitian	37
3.1.2	Definisi Operasional	37
3.1.2.1	Variabel Dependen	37
3.1.2.2	Variabel Independen.....	39
3.2	Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	44
3.3	Jenis dan Sumber Data	45
3.4	Metode Pengumpulan Data	46
3.5	Metode Analisis Data	46
3.5.1	Uji Statistik Deskriptif.....	46

3.5.2 Uji Kruskall-Wallis	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	48
4.2 Analisis Data dan Pengujian Hipotesis	49
4.2.1 Statistik Deskriptif.....	49
4.2.2 Uji Kruskall-Wallis	51
4.3 Interpretasi Hasil.....	61
4.3.1 Ukuran Perusahaan (ASSET) Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Governance</i> (CGI) di <i>Website</i> Perusahaan	61
4.3.2 ROE Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Governance</i> (CGI) di <i>Website</i> Perusahaan.....	62
4.3.3 Lamanya <i>Listing</i> (USIA) Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Governance</i> (CGI) di <i>Website</i> Perusahaan	63
4.3.4 <i>Floating Capital</i> Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Governance</i> (CGI) di <i>Website</i> Perusahaan.....	64
4.3.5 Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Governance</i> (CGI) di <i>Website</i> Perusahaan	66
4.3.6 Auditor Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Governance</i> (CGI) di <i>Website</i> Perusahaan.....	67
BAB V PENUTUP	68
5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Keterbatasan Penelitian	70
5.3 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daftar Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3.1	Definisi Operasional	42
Tabel 4.1	Gambaran Umum Pengambilan Sampel.....	48
Tabel 4.2	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	49
Tabel 4.3	Uji Kruskal-Wallis ASET	51
Tabel 4.4	Tes Statistik ASET	52
Tabel 4.5	Uji Kruskal-Wallis ROE.....	53
Tabel 4.6	Tes Statistik ROE	53
Tabel 4.7	Uji Kruskal-Wallis UMUR.....	54
Tabel 4.8	Tes Statistik UMUR	55
Tabel 4.9	Uji Kruskal-Wallis FLOAT	56
Tabel 4.10	Tes Statistik FLOAT.....	56
Tabel 4.11	Uji Kruskal-Wallis KOM	57
Tabel 4.12	Tes Statistik KOM.....	58
Tabel 4.13	Uji Kruskal-Wallis ASET	59
Tabel 4.14	Tes Statistik ASET	59
Tabel 4.15	Ringkasan Hasil Analisis	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran Penelitian	31
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A	DAFTAR PERUSAHAAN SAMPEL	76
LAMPIRAN B	DAFTAR ITEM PENGUNGKAPAN <i>CORPORATE</i> <i>GOVERNANCE</i>	79
LAMPIRAN C	DATA PENELITIAN.....	82
LAMPIRAN D	VARIABEL PENELITIAN.....	86
LAMPIRAN E	STATISTIK DESKRIPTIF.....	90
LAMPIRAN F	UJI KRUSKALL WALLIS.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa tahun ini, *Corporate Governance* menjadi topik yang menarik bagi para peneliti. *Corporate governance* menjadi faktor kunci untuk memahami perusahaan serta menjadi indikator kepercayaan investor terhadap setiap keputusan yang diambil oleh manajer dan dewan direksi perusahaan publik.

Ketertarikan terhadap konsep *corporate governance* dimulai sejak terjadinya skandal keuangan di Amerika dan Negara-Negara di Eropa. Salah satu peristiwa yang menjadi perhatian massa adalah runtuhnya perusahaan raksasa Enron. Kebangkrutan Enron membawa dampak yang luar biasa pada kondisi ekonomi negara tersebut karena ketidakterbukaan. Perusahaan yang kenyataannya dalam kondisi akut, selalu melaporkan laba dalam jumlah yang cukup besar. Akibatnya banyak ekspektasi positif dari para investor. Namun, ketidakberesan dari laporan keuangan yang dilaporkan akhirnya terdeteksi oleh *Securities Exchange Commission* (SEC) yang merupakan badan pengawas pasar modal negara tersebut. Sejak saat itu, laporan keuangan bukan menjadi satu-satunya pertimbangan untuk keputusan investasi. Akhirnya, *corporate governance* muncul menjadi salah satu solusi.

Corporate governance merupakan seperangkat prinsip yang mengatur tentang perusahaan dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diungkapkan dan dikomunikasikan kepada pihak eksternal. *Corporate governance* juga dapat

didefinisikan sebagai tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan berbagai partisipasi dalam perusahaan yang menentukan kinerja. Penerapan *corporate governance* yang baik diharapkan akan meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengawasan kinerja manajemen. *Corporate governance* yang baik akan menunjukkan akuntabilitas manajemen atas wewenang pengelolaan perusahaan yang diberikan oleh pemilik.

Adanya *corporate governance* akan memberikan batasan bagi manajemen untuk bertindak diluar kendali pemilik perusahaan seperti misalnya tindakan eksplorasi. Tindakan eksplorasi merupakan tindakan pencabutan hak milik perorangan untuk kepentingan umum disertai pemberian ganti rugi (Sabrina, 2009). Tindakan tersebut muncul karena adanya hubungan keagenan antara pemilik (pemegang saham) perusahaan dengan agen (manajemen). Konflik kepentingan terjadi saat manajemen bertindak tidak sesuai dengan kehendak pemilik. Hal itu akan menimbulkan biaya agensi. *Corporate governance* menawarkan solusi secara legal dengan mengatur sistem tata kelola perusahaan dan pengungkapannya.

Pengungkapan *corporate governance* penting untuk dilakukan secara akurat, tepat waktu, dan terbuka (*transparans*), sehingga akan menambah nilai (*value*) perusahaan bagi *stakeholder*. Tanpa pengungkapan *corporate governance* yang jelas, para *stakeholder* tidak dapat mengetahui bagaimana perusahaan dikelola dan kondisi perusahaan yang dikelola oleh pihak manajemen. *Corporate governance* juga menjadi kriteria yang sangat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh para investor. Investor akan mempunyai keyakinan lebih pada

perusahaan dengan *corporate governance* yang baik (McKinsey ,2002 dalam Gandi, 2008).

Pengetahuan tentang struktur pengelolaan perusahaan dapat digunakan untuk menilai kredibilitas informasi keuangan yang diberikan perusahaan. Selain itu bagi pemerintah, dapat digunakan untuk menilai kualitas informasi dan sebagai pedoman bagi *stakeholder* untuk menetapkan harapan-harapan tentang masa depan perusahaan yang lebih akurat (Bhat, 2006). Karena pentingnya *corporate governance* bagi pengambilan keputusan investasi, maka perusahaan harus mengungkapkan informasi ini dan berkontribusi dalam meningkatkan transparansi perusahaan.

Di indonesia, *corporate governance* mulai diperhatikan setelah adanya krisis pada tahun 1999. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerapan *corporate governance* dengan baik, salah satunya dengan membentuk Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* pada tahun 1999. Pembentukan komite ini berdasarkan Keputusan Menko EKUIN Nomor: KEP/31/M.EKUIN/08/1999 bertugas untuk membuat rekomendasi pedoman *Corporate Governance*. Setelah mengalami berbagai perbaikan, akhirnya pada tahun 2001, pedoman tersebut dipublikasikan. Pedoman tersebut menjadi panduan praktik penerapan *corporate governance* di Indonesia.

Semenjak menjadi perhatian dari perusahaan di seluruh dunia, banyak penelitian tentang *corporate governace* dilakukan. Diantaranya penelitian tentang *corporate governance* dan penerapannya di indonesia yang dilakukan oleh Thomas S. Kaihatu (2006). Penelitian tersebut memastikan bahwa proses

pengelolaan manajemen berjalan dengan instrumen *good corporate governance*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep penelitian tersebut, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*. Selain itu terdapat unsur budaya organisasi yang mempengaruhi penerapan *good corporate governance* di Indonesia.

Penelitian lain tentang *corporate governance* antara lain dilakukan oleh Mohammad (2010) meneliti tentang mekanisme *corporate governance* dan luas pengungkapan pada perusahaan publik di Malaysia. Penelitian tersebut menemukan bahwa perusahaan dengan persentase yang tinggi dari jumlah keluarga yang duduk di kursi dewan akan berdampak negatif pada transparansi perusahaan. Sedangkan Rini (2010), menganalisis luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan perusahaan publik di Indonesia.

Namun demikian, masih sedikit jumlahnya penelitian tentang *corporate governance* yang memperhatikan perkembangan teknologi komunikasi. Pertimbangan sarana pengungkapan *corporate governance* masih sangat sedikit. Padahal sarana pengungkapan dalam praktiknya sangat menentukan apakah informasi tersebut dapat diakses oleh *stakeholder*. Informasi yang diungkapkan perusahaan akan percuma jika *stakeholder* tidak dapat memperolehnya, sehingga tujuan transparansi perusahaan tidak dapat diwujudkan. Seperti yang ditunjukkan

oleh Bushman (2004), transparansi perusahaan tergantung pada saluran mana yang digunakan untuk menyebarluaskan informasi.

Transparansi dapat ditunjukkan dengan pengungkapan *corporate governance*. Namun, kurangnya intensitas pengungkapan *corporate governance* akan mengurangi tingkat transparansi perusahaan. Secara historis, perusahaan telah menggunakan laporan tahunan (*annual report*) sebagai sarana pilihan (Collet dan Hrasky, 2005). Informasi *corporate governance* merupakan jenis informasi kualitatif yang harusnya dilaporkan secara berkala dan segera mungkin sehingga keputusan yang diambil oleh *stakholder* akan tepat dan efisien. Selain itu, peraturan hukum yang mengatur praktik dari pengungkapan sukarela masih jarang sehingga mempersulit pengguna dalam menggunakannya. Pada akhirnya, penggunaan *website* menjadi salah satu solusi yang diharapkan mampu meningkatkan transparansi.

Meskipun demikian, sampai sekarang belum ada aturan atau pedoman yang mengatur tentang bagaimana pengungkapan *corporate governance* diaplikasikan oleh perusahaan. Akibatnya berdampak pada penerjemahan informasi yang disediakan dalam *website* tersebut oleh para pengguna informasi. Disamping itu, kesulitan juga akan dihadapi dalam penelitian yang menggunakan nilai tingkat pengungkapan *corporate governance* dalam *website* perusahaan. Kesulitan akan dihadapi saat menentukan item-item yang harus diungkapkan dalam *website* oleh perusahaan karena secara struktur dan isi berbeda dengan pengungkapan yang dilakukan perusahaan dalam *annual report*.

Penelitian ini menawarkan pendekatan yang meneliti relevansi teknologi, terutama internet, untuk meningkatkan transparansi perusahaan publik. Penelitian ini mempertimbangkan fakta bahwa perkembangan teknologi komunikasi telah mempengaruhi setiap bidang akuntansi terutama pelaporan keuangan dan kondisi perusahaan. *Stakeholder* akan dengan mudah memperoleh informasi yang valid, dapat dipercaya, cepat, dan dengan biaya yang murah tentang kondisi perusahaan. Secara khusus, internet menawarkan banyak kemungkinan baik untuk perusahaan maupun badan pengawas untuk meningkatkan keterbukaan dan tata kelola perusahaan.

Penelitian berbasis internet pernah dilakukan oleh Gandia (2008) tentang pengungkapan *corporate governance* berbasis internet oleh perusahaan-perusahaan publik di Spanyol. Untuk menganalisis tingkat pengungkapan *corporate governance*, Gandia (2008) menggunakan tiga pendekatan, yaitu menganalisis pengungkapan *corporate governance* dalam *annual report*, pengungkapan dalam *website* Badan Regulasi Pasar Modal, dan pengungkapan dalam *website* masing masing perusahaan. Sedangkan variabel yang diteliti dalam penelitian tersebut adalah ukuran perusahaan, ROE, lamanya listing, ukuran dewan komisaris, CEO *duality*, *floating capital*, visibilitas media, dan *analyst following*.

Penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa pertama, tingkat pengungkapan perusahaan-perusahaan publik di Spanyol masih rendah. Kedua, perusahaan-perusahaan tertentu memperlakukan *internet* sebagai media yang tepat untuk melengkapi informasi yang diterbitkan secara konvensional (*annual*

report). Ketiga, tingkat pengungkapan informasi menunjukkan eksistensi perusahaan di media dan hal tersebut menambah keyakinan para *investor* untuk menanamkan modalnya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini hanya menggunakan satu pendekatan dalam menilai tingkat pengungkapan *corporate governance*. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis informasi melalui pemeriksaan informasi perusahaan yang diperoleh dari *website* perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan menggunakan *website* mereka sendiri sebagai sarana untuk meningkatkan keterbukaan dan transparansi dalam hal tata kelola perusahaan. Selain itu, terdapat beberapa variabel yang tidak digunakan yaitu CEO *duality*, visibilitas media, dan *analyst following*. Karena Indonesia menganut sistem *two-tier* maka variabel CEO *duality* tidak dapat diterapkan dalam penelitian ini. Tidak adanya media keuangan yang resmi juga akan mempersulit pengukuran tingkat visibilitas media perusahaan di Indonesia. Selain itu, karena tidak setiap perusahaan memberikan informasi tentang analisis keuangan yang dilakukan lembaga analis dan karena badan regulasi tidak menyediakan informasi tentang analisis perusahaan sehingga variabel *analyst following* juga tidak dapat diterapkan.

Pertimbangan sarana pengungkapan menggunakan internet didasarkan kemungkinan perusahaan untuk mengungkapkan informasi secara global dengan biaya yang rendah. Penerapan dan pengembangan pengungkapan *corporate governance* menggunakan internet pada perusahaan memberikan beberapa manfaat, antara lain memfasilitasi komunikasi antara perusahaan dan investor

(khususnya pemegang saham), mengurangi biaya distribusi dan meningkatkan ketepatan waktu dari informasi perusahaan, mendorong keterlibatan pemegang saham dalam perusahaan, akses yang demokratis untuk informasi perusahaan serta menambah kredibilitas dalam tata kelola yang baik (Gandia,2008).

Hariadi (2010) menyatakan bahwa penggunaan internet di Indonesia sangat pesat. Indonesia menduduki posisi kelima didunia sebagai pengguna jasa internet. *Internetworldstats* (2010) juga menyatakan bahwa pengguna internet di Indonesia pada tahun 2000 sebesar 2 juta jiwa, sampai akhir 2009 meningkat menjadi 30 juta jiwa atau 12,5 persen dari populasi dunia. Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi dengan fasilitas internet.

Penelitian tentang pengaruh penggunaan internet sebagai media dilakukan oleh Ching Lai (2010), meneliti pengaruh *internet financial reporting (IFR)* terhadap harga saham di Bursa Efek Taiwan. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pasar modal cepat merespon informasi yang disediakan di internet. Perusahaan dengan tanpa IFR akan menghasilkan *abnormal return* saham yang tinggi dibandingkan perusahaan yang menggunakan IFR. Hal itu menunjukkan bahwa penggunaan internet sebagai media penyampaian informasi akan mendorong terjadinya efisiensi pasar.

Pertimbangan lain dari penggunaan internet sebagai sarana meningkatkan transparansi adalah penjaminan atas informasi yang diterbitkan melalui internet oleh pemerintah. Pemerintah menjamin keabsahan dan unsur pertanggungjawaban dari penyedia informasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan adanya undang-

undang tersebut, akan mengurangi keraguan dari para pengguna informasi tentang kebenaran informasi. Sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang tepat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka judul penelitian ini adalah **“Analisis Pengungkapan *Corporate Governance* Berbasis Internet oleh Perusahaan Publik di Indonesia Tahun 2010.”**

1.2 Rumusan Masalah

Pengungkapan *corporate governance* penting untuk dilakukan secara akurat, tepat waktu, dan terbuka (*transparans*), sehingga akan menambah nilai (*value*) perusahaan bagi *stakeholder*. Namun, informasi yang diungkapkan perusahaan akan percuma jika *stakeholder* tidak dapat memperolehnya, sehingga tujuan transparansi perusahaan tidak dapat diwujudkan. Untuk itu, internet menawarkan sarana baru untuk pengungkapan *corporate governance* yang efektif.

Penelitian ini menawarkan pendekatan baru yang meneliti relevansi teknologi, terutama internet, untuk meningkatkan transparansi perusahaan publik. Penelitian ini mempertimbangkan fakta bahwa perkembangan teknologi komunikasi telah mempengaruhi setiap bidang akuntansi terutama pelaporan keuangan dan kondisi perusahaan. *Stakeholder* akan dengan mudah memperoleh informasi yang valid, dapat dipercaya, cepat, dan dengan biaya yang murah tentang kondisi perusahaan. Secara khusus, internet menawarkan banyak kemungkinan baik untuk perusahaan maupun badan pengawas untuk meningkatkan keterbukaan dan tata kelola perusahaan.

Pengungkapan *corporate governance* berbasis internet dapat dilakukan dengan menggunakan media *website*. Website dianggap sebagai media yang efektif karena dapat diakses dengan mudah, oleh siapapun, kapanpun, dan dengan biaya yang murah. Pengungkapan *corporate governance* tersebut dapat dilakukan di website perusahaan itu sendiri. Meskipun demikian, tingkat pengungkapan *corporate governance* juga dapat dinilai berdasarkan laporan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan.

Dalam pengungkapan *corporate governance*, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah ukuran perusahaan, *return of equity (ROE)*, lamanya *listing, floating capital*, ukuran dewan komisaris, dan tipe auditor. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut dapat dibentuk sebuah rumusan masalah yaitu: Apakah terdapat perbedaan tingkat pengungkapan *corporate governance* di *website* perusahaan dalam ukuran perusahaan, *return on equity*, usia *listing*, ukuran dewan komisaris, dan tipe auditor yang berbeda?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris:

1. Tingkat pengungkapan *corporate governance* di *website* perusahaan pada tingkat ukuran perusahaan yang berbeda.
2. Tingkat pengungkapan *corporate governance* di *website* perusahaan pada tingkat *Return of equity (ROE)* yang berbeda.
3. Tingkat pengungkapan *corporate governance* di *website* perusahaan pada tingkat lamanya *listing* yang berbeda.

4. Tingkat pengungkapan *corporate governance* di *website* perusahaan pada tingkat *floating capital* yang berbeda.
5. Tingkat pengungkapan *corporate governance* di *website* perusahaan pada tingkat ukuran dewan komisaris yang berbeda.
6. Tingkat pengungkapan *corporate governance* di *website* perusahaan pada perusahaan dengan auditor yang berbeda.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adntara lain:

1. Bagi peusahaan, memberi informasi tambahan mengenai penerapan dan pengungkapan *corporate governance*.
2. Bagi investor, sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan investasi.
3. Bagi peneliti, sebagai acuan untuk mengembangkan penelitian tentang pengungkapan *corporate governance*.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan yang merupakan bentuk ringkas dari keseluruhan isi penelitian dan gambaran permasalahan yang diangkat. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka yang menguraikan landasan teori dan penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai acuan dasar teori dan analisis bagi penelitian ini. Bab ini juga menggambarkan kerangka teoritis.

BAB III Metode Penelitian yang menguraikan tentang pemilihan desain penelitian, pemilihan pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data, serta pemilihan setting penelitian.

BAB IV Hasil dan Analisis yang akan membahas dan menganalisis tentang bagaimana pelaksanaan *corporate governance* dan struktur kepemilikan.

BAB V Penutup berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian ini yang menjawab pertanyaan penelitian serta keterbatasan penelitian dan saran yang diberikan bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan konsep *corporate governance*. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa dalam hubungan antara principal dan agen terdapat pemisahan antara pemilik sebagai principal dan manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan, maka akan muncul permasalahan agensi karena masing-masing pihak tersebut akan selalu berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya. Sehingga hubungan agensi tersebut rawan terjadinya konflik antar pihak-pihak yang berkepentingan yang akan mempengaruhi perusahaan tersebut.

Eisenhardt (1989) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rational*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko.

Dalam aplikasinya, masalah keagenan terwujud dalam suatu kontrak kerja antara pemilik perusahaan dengan pihak manajemen. Kontrak kerja tersebut mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan. Sehingga inti dari agensi teori adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan

prinsipal untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen dalam hal terjadi konflik kepentingan (Scott, 1997 dalam Arifin , 2005).

Pada ahirnya hubungan antara pemilik dan manajer tersebut akan menimbulkan masalah saat pihak-pihak tersebut mempunyai tujuan yang berbeda. Manajer yang diberi wewenang untuk menjalankan perusahaan akan berusaha meningkatkan *incentive* dalam rangka untuk memakmurkan dirinya sendiri sehingga mengabaikan tugas utama yaitu memaksimalkan kemakmuran pemilik.

Manajer yang diberi wewenang sebagai pengelola perusahaan mempunyai lebih banyak informasi tentang kondisi perusahaan dan prospek perusahaan di masa depan dibandingkan pemilik perusahaan. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya assimetri informasi antara manajer dengan pemilik perusahaan. Manajer diwajibkan memberikan informasi-informasi tersebut kepada pemilik perusahaan. Informasi tersebut informasi yang diberikan juga harus transparan, tepat, dan dapat dipercaya. Munculnya masalah agensi lebih disebabkan karena kurangnya pengawasan. Sehingga muncullah konsep *Corporate governace*.

Menurut Shleifer dan Vishny (1997), *corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer. Informasi internal perusahaan yang disediakan manajemen akan menjadi pertimbangan penting bagi para investor. *Corporate governance* diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan (Sabrina, 2010). Pada ahirnya pengungkapan *corporate governance* diharapkan mampu mengurangi biaya agensi.

2.1.2 *Corporate governance*

Corporate governance merupakan seperangkat prinsip yang mengatur tentang perusahaan dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diungkapkan dan dikomunikasikan kepada pihak eksternal. Sabrina (2010) mendefinisikan *corporate governance* sebagai tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan berbagai partisipasi dalam perusahaan yang menentukan kinerja. Sementara itu, Forum *Corporate Governance* in Indonesia (2000) menggunakan definisi *corporate governance* dari Cadbury Commitee yaitu:

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.”

Penerapan *corporate governance* yang baik diharapkan akan meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengawasan kinerja manajemen. *Corporate governance* yang baik akan menunjukkan akuntabilitas manajemen atas wewenang pengelolaan perusahaan yang diberikan oleh pemilik.

Definisi *Corporate Governance* sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No Kep 117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktik GCG pada BUMN adalah:

“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”.

Definisi ini menekankan pada keberhasilan usaha dengan memperhatikan akuntabilitas yang berlandaskan pada peraturan perundangan dan nilai-nilai etika

serta memperhatikan stakeholders yang tujuan jangka panjangnya adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan nilai pemegang saham.

Dalam Isgiyarta dan Tristiarini (2005), *Malaysian High Level Finance Committee on Corporate Governance* mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak-pihak lain.

Adanya *corporate governance* akan memberikan batasan bagi manajemen untuk bertindak diluar kendali pemilik perusahaan seperti misalnya tindakan eksplorasi. Tindakan eksplorasi merupakan tindakan pencabutan hak milik perorangan untuk kepentingan umum disertai pemberian ganti rugi (Sabrina, 2010). Tindakan tersebut muncul karena adanya hubungan keagenan antara pemilik (pemegang saham) perusahaan dengan agen (manajemen). Konflik kepentingan terjadi saat manajemen bertindak tidak sesuai dengan kehendak pemilik. Hal itu akan menimbulkan biaya agensi. *Corporate governance* menawarkan solusi secara legal dengan mengatur sistem tata kelola perusahaan dan pengungkapannya.

Komite Nasional Kebijakan *Governance* menjelaskan bahwa *corporate governance* merupakan acuan bagi perusahaan dalam rangka :

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu dewan komisaris, direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris, dan anggota direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Sehingga dalam *corporate governance* terdapat empat unsur yang menjadi prinsip-prinsip dalam *corporate governance* menurut FCGI, yaitu:

1. *Fairness* (Keadilan)

Menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta

menjamin terlaksananya komitmen dengan para *investor*. Penetapan tanggung jawab dewan komisaris, direksi, kehadiran komisaris independen dan komite audit, serta penyajian informasi (terutama laporan keuangan) dengan pengungkapan penuh merupakan perwujudan dari prinsip keadilan/kewajaran.

2. *Transparency* (Transparansi)

Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.

3. *Accountability* (Akuntabilitas)

Menjelaskan peran tanggung jawab, serta mendukung usahan untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris (dalam *Two Tiers System*). Realisasi dari prinsip ini dapat berupa pendirian dan pengembangan komite audit yang dapat mendukung terlaksananya fungsi pengawasan dewan komisaris, juga perumusan yang jelas terhadap fungsi audit internal. Khusus untuk bidang akuntansi, penyiapan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta diterbitkan tepat waktu juga jelas merupakan perwujudan dari prinsip akuntabilitas in.

4. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Memastikan dipatuhinya perturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai social. Prinsip tanggung jawab ini juga berhubungan dengan kewajiban perusahaan untuk mematuhi semua

peraturan dan hukum yang berlaku, termasuk juga prinsip-prinsip yang mengatur tentang penyusunan dan penyampaian laporan keuangan perusahaan.

2.1.3 Pengungkapan *Corporate Governance* Berbasis Internet

Pengungkapan informasi *corporate governance* merupakan suatu pengungkapan yang sukarela bagi perusahaan. *Corporate governance* merupakan pengungkapan informasi tata kelola perusahaan serta prinsip-prinsip yang mengatur tentang perusahaan dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diungkapkan dan dikomunikasikan kepada publik. Meskipun demikian belum ada aturan yang mengatur bagaimana seharusnya perusahaan mengungkapkan dan mengkomunikasikan informasi tersebut kepada publik.

Secara umum, informasi *corporate governance* diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Sehingga informasi tersebut hanya dapat diketahui oleh para *stakeholder* setiap akhir tahun. Disisi lain, karakteristik informasi *corporate governance* merupakan jenis informasi kualitatif yang seharusnya lebih sering diketahui oleh masyarakat. Pihak yang berkepentingan seharusnya dapat mengetahui informasi tersebut secara cepat dan tepat agar keputusan yang diambil lebih tepat. Hal ini sepaham dengan Bushman (2004) yang menyatakan bahwa transparansi perusahaan tergantung pada saluran yang digunakan untuk menyebarkan informasi. Saluran informasi dapat mendukung atau menghambat ketersediaan informasi yang disebarluaskan.

Penggunaan internet sebagai saluran penyebaran informasi mampu mengatasi masalah tersebut. Internet diharapkan mampu menebarkan informasi dengan cepat dan tepat. Internet dapat diakses secara global tanpa dibatasi oleh tempat dan waktu. Selain itu internet menawarkan banyak kemungkinan baik bagi perusahaan dan badan pengawas untuk menawarkan keterbukaan. Dengan mengakses *website* perusahaan, investor dapat memilih informasi yang dibutuhkan bahkan memungkinkan untuk berkomunikasi secara langsung dengan pihak internal perusahaan. Secara keseluruhan, internet memberi manfaat dalam pemotongan biaya, distribusi, frekuensi dan kecepatan (Gandia, 2008).

Menurut Ashbaugh (1999) dalam Lordanita (2006) keuntungan potensial yang didapatkan dari penggunaan internet (*Internet Financial Reporting*) dalam praktik pengungkapan sukarela yang lain adalah sebagai berikut.

1. Internet reporting mengurangi biaya penyebaran informasi perusahaan. Jika para pembuat keputusan menggunakan *website* perusahaan untuk mendapatkan informasi keuangan, maka perusahaan dapat menghindari biaya percetakan dan distribusi yang dikaitkan dengan pengiriman surat laporan tahunan dan kuartalan kepada para konsumen informasi yang sedemikian.
2. Internet adalah alat dimana perusahaan-perusahaan bisa berkomunikasi dengan konsumen informasi yang sebelumnya tidak dikenal. Laporan menggunakan *hardcopy* adalah batasan pada pihak-pihak yang telah meminta dan disyaratkan untuk menerima informasi keuangan. Jika perusahaan sudah membuat *website* dan terlibat dalam IFR, maka

informasi keuangan menjadi barang publik dengan akses global yang tidak terbatas. Jadi perusahaan bisa memperluas khalayak pengungkapan mereka (yaitu, memenuhi permintaan akan informasi keuangan mereka) dengan terlibat dalam IFR.

3. Karena manfaat informasi tergantung pada lingkungan pembuat keputusan, maka IFR bisa memfasilitasi penyebaran pengungkapan keuangan perusahaan melalui alat internet. Alat ini memfasilitasi pencarian kembali informasi istimewa dan analisis oleh berbagai pembuat keputusan yang berbeda-beda. Alat internet meliputi *web browser*, *hyperlink* dan alat transfer data. IFR perusahaan berpotensi memberikan mekanisme kepada konsumen dimana mereka bisa *men-download* informasi keuangan untuk analisis mereka sendiri (FASB, 1998)
4. IFR bisa memperbaiki pengungkapan keuangan perusahaan dengan melengkapi praktik penyebaran informasi perusahaan yang tradisional. Contoh, konsumen informasi menuntut informasi yang lebih tepat waktu saat perusahaan mempersingkat *product life cycle*, menggunakan informasi keuangan yang kompleks untuk mengelola risiko dan sebagainya (Wallman, 1995). Perusahaan mengkomunikasikan secara langsung informasi ini kepada klien tertentu misalnya, para analis. Meskipun demikian, konsumen informasi yang lain harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk mendapatkan informasi yang tepat waktu. Dengan terlibat dalam IFR, perusahaan bisa menurunkan biaya informasi

pengguna yang sedemikian dengan memberikan akses yang sesegera pada informasi yang tepat waktu.

5. IFR berpotensi memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan keuangan mereka jika perusahaan mengungkapkan data keuangan *incremental* dan *disagregat* yang lebih relevan di dalam *website* mereka (misal, penjualan mingguan versus bulanan).

2.1.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *corporate governance*

2.1.4.1 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan faktor penting untuk menjelaskan tingkat pengungkapan *corporate governance*. Menurut Bushman (2003) ukuran perusahaan merupakan variabel penting dalam meneliti transparansi perusahaan. Salah satu wujud transparansi perusahaan adalah pengungkapan *corporate governance* yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga kemungkinan akan terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat pengungkapan *corporate governance*.

Perusahaan besar akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan kecil. Teori agensi menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar daripada perusahaan kecil (Jensen dan Meckling, 1976) . Biaya keagenan muncul karena adanya asimetri informasi antara agen dan *principle*. Untuk memperkecil biaya

keagenan, perusahaan besar mungkin akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak.

Perusahaan besar merupakan entitas yang banyak disorot oleh pasar maupun publik secara umum. Sehingga, perusahaan besar akan menghadapi biaya politis yang lebih besar daripada perusahaan kecil. Akuntabilitas perusahaan besar akan menjadi perhatian lebih banyak mendorong perusahaan akan mengungkapkan informasi yang lebih besar. Penyebaran informasi tentang perusahaan yang luas akan mengurangi biaya pemantauan pemegang saham. Selain itu, pengungkapan yang luas akan mengurangi terjadinya *asimetri* informasi.

Alasan lainnya, perusahaan besar memiliki sumber daya yang besar. Banyak sumber daya yang tersedia untuk membiayai penyediaan informasi. Penggunaan internet sebagai media informasi akan memberi banyak keuntungan kepada perusahaan. Efisiensi biaya dapat diperoleh perusahaan besar, mengingat besarnya informasi yang harus diungkapkan perusahaan.

Sebaliknya, perusahaan kecil umumnya berada pada situasi persaingan yang ketat dengan perusahaan lain. Perusahaan dengan sumber daya yang kecil mungkin tidak memiliki cukup banyak informasi sehingga perlu ada tambahan biaya yang relatif besar untuk dapat melakukan pengungkapan selengkap yang dilakukan oleh perusahaan besar. Perusahaan kecil mungkin tidak memiliki cukup dana untuk melakukan pengungkapan secara luas.

2.1.4.2 Return On Equity (ROE)

Return On Equity (ROE) merupakan rasio antara laba bersih terhadap total *equity* atau menunjukkan pengembalian atas *equity* yang dimiliki. ROE digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian perusahaan atau efektivitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan menggunakan ekuitas yang dimiliki perusahaan. ROE yang tinggi menggambarkan kinerja perusahaan yang baik. Saat kinerja perusahaan baik, perusahaan akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak untuk menunjukkan keberhasilannya. Disamping itu, perusahaan dengan performa yang baik mempunyai dana yang berlebih untuk membiayai penyediaan informasi.

Website perusahaan diasumsikan akan lebih *update* saat perusahaan dalam kondisi yang baik. Sebaliknya, perusahaan yang dalam kondisi yang kurang sehat, akan membatasi informasi yang diberikan kepada publik. Manajer cenderung untuk mengungkapkan lebih banyak informasi tentang kinerja mereka dalam rangka untuk mendapatkan kesan yang baik dalam pasar modal (Mcknight dan Tomkins ,1999 dalam Hossain dan Hammami, 2009).

2.1.4.3 Lamanya Listing (Age)

Lamanya *listing* menunjukkan jumlah tahun perusahaan yang diperdagangkan secara terus menerus di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan yang baru melakukan *listing* akan memiliki insentif untuk mengungkapkan informasi lebih banyak untuk memerangi skeptisisme dan meningkatkan kepercayaan investor (Haniffa dan Cooke, 2002). Perusahaan yang baru memasuki pasar

terbuka akan berusaha mendapatkan perhatian publik. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan penyediaan informasi sebanyak mungkin kepada publik.

Disamping itu, perusahaan yang baru saja melakukan *listing* kurang begitu dikenal oleh para investor. Sehingga agar para investor tertarik, perusahaan tersebut melakukan pengungkapan-pengungkapan tentang informasi yang berkaitan dengan perusahaan yang bersifat baik. Pengungkapan menggunakan *website* merupakan salah satu cara yang efektif.

2.1.4.4 Floating Capital

Floating capital perusahaan publik adalah perkiraan proporsi saham tidak dimiliki oleh pemilik besar. Sehingga masalah yang sering terjadi dalam kepemilikan besar, yaitu adanya *free rider* dapat dihindari (Grossman dan Hart, 1980). Jika sebuah perusahaan yang dimiliki sangat tersebar, tidak ada pemegang saham individu akan memiliki insentif untuk mengawasi perilaku para eksekutif sehingga mendorong perusahaan menerapkan kebijakan aktif. Dalam hal pengungkapan *corporate governance* perusahaan, seperti yang diperkirakan oleh teori keagenan (Leftwich et al, 1981 dalam Raffournier, 1995 dalam Gandia, 2008), kebijakan aktif perusahaan dapat berkontribusi untuk mengurangi biaya pengawasan bagi pemegang saham kecil dan dengan cara ini akan menguntungkan kepentingan mereka dalam pengembangan bisnis.

2.1.4.5 Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris yang dimiliki oleh perusahaan, terdiri dari komisaris utama, komisaris independen, dan komisaris (Rini, 2010). Jumlah dewan yang optimal tergantung pada tingkat efisiensi mereka dalam pemenuhan fungsi pengawasan. Tetapi, konsentrasi posisi dewan komisaris dapat menyebabkan kurangnya transparansi. Dengan jumlah anggota dewan komisaris yang besar, meskipun meningkatkan kapasitas pengawasan, tetapi dapat merugikan perusahaan dengan memperpanjang proses pengambilan keputusan dan prosedur komunikasi (Jensen ,1993 dalam Gandia, 2008).

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada dewan direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance* (KNKG, 2006). Sehingga besarnya dewan akan meningkatkan pengungkapan *corporate governance* baik secara tradisional (annual report) maupun pengungkapan dengan internet.

2 .1.4.6 Ukuran Auditor

Ukuran auditor merupakan besaran Kantor Akuntan Publik yang jasanya digunakan oleh perusahaan. Meskipun belum terdapat aturan yang mengatur bahwa pengungkapan *corporate governance* melalui sarana *website* harus diaudit, namun pengungkapan informasi *mandatory* melalui *annual report* dan laporan keuangan juga termasuk dalam item yang harus diungkapkan dalam

pengungkapan melalui media *website*. Menurut Becker (1998) dalam Bernadi (2009) bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP yang berukuran besar akan menyajikan laporan keuangan yang lebih berkualitas berdasarkan berdasarkan regulasi yang telah ditentukan, karena memiliki kualitas, reputasi dan kredibilitas lebih dibandingkan KAP ukuran kecil. Sehingga diharapkan kualitas pengungkapan yang dilakukan melalui media *website* sebanding dengan kualitas pengungkapan melalui *annual report* dan laporan keuangan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian tentang *corporate governance* telah sering dilakukan. Namun masih sedikit yang mengaitkan antara pengungkapan *corporate governance* dengan kemajuan teknologi komunikasi, khususnya internet. Pengungkapan melalui internet memang masih jarang dilakukan, meskipun pada kenyataannya penggunaan internet pada masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi.

Penelitian lain tentang *corporate governance* antara lain dilakukan oleh Mohammad (2010) meneliti tentang mekanisme *corporate governance* dan luas pengungkapan pada perusahaan publik di Malaysia. Penelitian tersebut menemukan bahwa perusahaan dengan persentase yang tinggi dari jumlah keluarga yang duduk di kursi dewan akan berdampak negatif pada transparansi perusahaan.

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Gandia (2008) tentang pengungkapan *corporate governance* berbasis internet oleh perusahaan-

perusahaan publik di Spanyol. Penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa pertama, tingkat pengungkapan perusahaan-perusahaan publik di Spanyol masih rendah. Kedua, perusahaan-perusahaan tertentu memperlakukan *internet* sebagai media yang tepat untuk melengkapi informasi yang diterbitkan secara konvensional (*annual report*). Ketiga, tingkat pengungkapan informasi menunjukkan eksistensi perusahaan di media dan hal tersebut menambah keyakinan para *investor* untuk menanamkan modalnya.

Kaihatu (2006), melakukan penelitian tentang *good corporate governance* dan penerapan di Indonesia. Penelitian ini menekankan dua hal, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan dan tepat waktu. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*. Selain itu, budaya organisasi turut mempengaruhi penerapan *good corporate governance* di Indonesia.

Rini (2010), juga melakukan penelitian tentang luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan pada perusahaan publik di Indonesia. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan. Faktor-faktor yang diuji antara lain besaran perusahaan, umur listing perusahaan, kepemilikan dispersi, perusahaan multinasional, ukuran dewan komisaris, dan ukuran auditor. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2007 dan 2008 sebanyak 126 perusahaan.

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Variabel Dependen	Variabel Independen	Hasil Penelitian
1.	Gandia (2008)	Indeks pengungkapan <i>corporate governance</i> di internet	Ukuran perusahaan, ROE, Usia listing, Ukuran dewan, <i>CEO duality</i> , <i>floating capital</i> , visibilitas media, analisis kedepan	Pengungkapan <i>corporate governance</i> dipengaruhi oleh perusahaan dengan skor tinggi untuk transparansi juga dan paling mungkin untuk menggunakan internet sebagai saluran untuk pengungkapan <i>corporate governance</i> di internet.
2.	Kaihatu (2006)	<i>Corporate governance</i> dan penerapannya di Indonesia		pelaksanaan <i>Corporate Governance</i> di Indonesia masih sangat rendah, hal ini terutama disebabkan oleh kenyataan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia belum sepenuhnya memiliki <i>Corporate Culture</i> sebagai inti dari <i>Corporate Governance</i> .
3.	Rini (2010)	Luas pengungkapan <i>corporate governance</i>	Besaran perusahaan, umur <i>listing</i> , kepemilikan dispersasi, perusahaan multinasional, ukuran dewan komisaris	Besaran perusahaan mempengaruhi secara signifikan luas pengungkapan <i>corporate governance</i> . Sedangkan variabel yang lain tidak mempengaruhi secara signifikan.
4.	Sabrina (2010)	Kinerja perusahaan: kinerja operasi (ROE) dan kinerja pasar	<i>Corporate governance</i> , kepemilikan manajerial, kepemilikan	Tidak ada hubungan yang signifikan antara <i>corporate governance</i> dengan kinerja pasar, tetapi terdapat hubungan yang signifikan

		(Tobins Q)	institusional	antara <i>corporate governance</i> dengan kinerja operasional.
5.	Almilia dan Retrinasari (2007)	Luas kelengkapan pengungkapan wajib dan sukarela	Rasio likuiditas, rasio <i>leverage</i> , rasio <i>net profit margin</i> , besar perusahaan, status perusahaan	Terdapat pengaruh yang signifikan antara rasio likuiditas, rasio <i>leverage</i> , besar perusahaan, dan status perusahaan terhadap luas pengungkapan wajib. Tidak ada variabel berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela.
6.	Hargiyantoro (2010)	Frekuensi perdagangan saham	Praktik IFR dan tingkat pengungkapan informasi <i>website</i>	Praktik IFR berpengaruh positif terhadap frekuensi perdagangan saham. Tingkat pengungkapan informasi dalam <i>website</i> juga berpengaruh positif terhadap frekuensi perdagangan saham.
7.	Wahyudi (2010)	Nilai pasar perusahaan	Tingkat transparansi <i>good corporate governance</i> , ukuran dewan komisaris, dan <i>cross-directorship</i> dewan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, <i>Cross-directorship</i> dewan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

Sumber : Data diolah, 2011

2.3 Kerangka Pemikiran

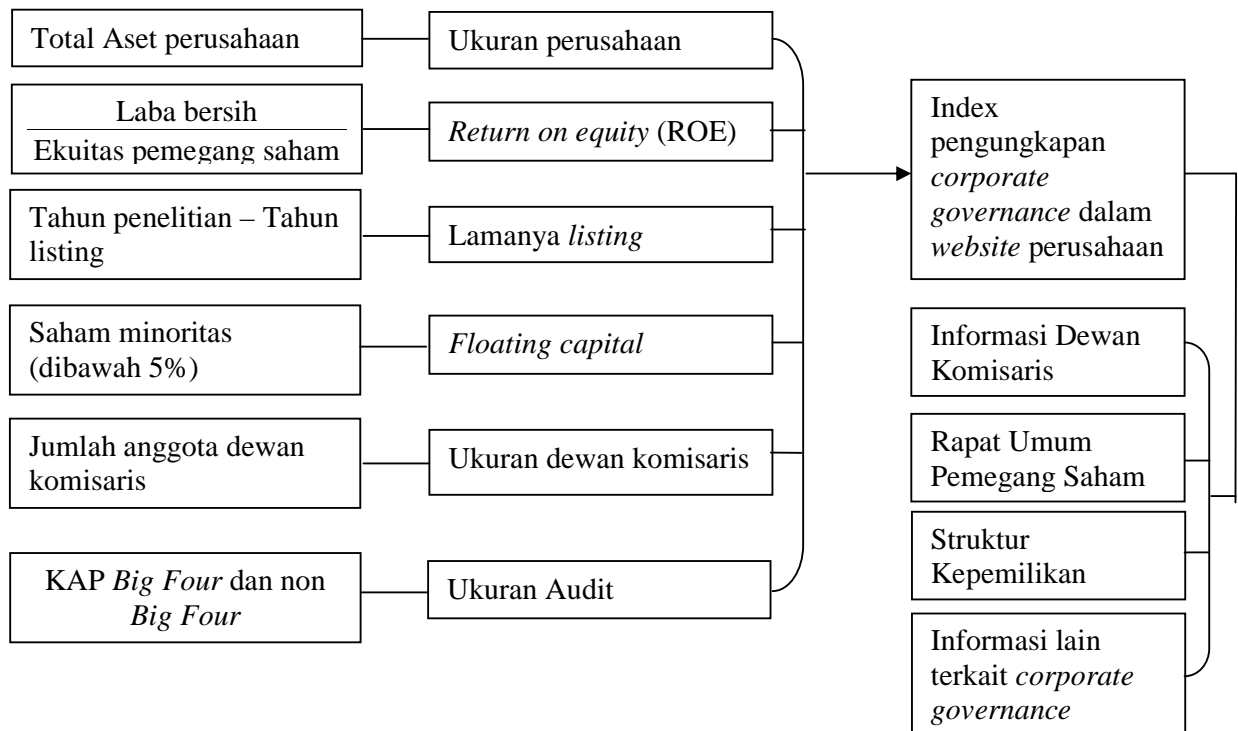
2.3.2 Pengungkapan *Corporate Governance* dalam *website* Perusahaan

Sarana pengungkapan secara online salah satunya adalah menggunakan *website*. *Website* dianggap sebagai sarana yang efektif untuk menyebarkan

informasi karena dapat diakses dengan mudah oleh siapapun dengan biaya yang murah. Disamping itu akan meningkatkan kecepatan penyebaran informasi karena dapat diakses setiap waktu.

Informasi *corporate governance* merupakan informasi yang seharusnya dapat diakses secara cepat. Sehingga informasi tersebut berguna bagi investor secara maksimal. Dalam menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *corporate governance* di *website* perusahaan, menggunakan beberapa variabel. Sedangkan variabel independen penelitian ini adalah ukuran perusahaan, *return on equity* (ROE), lamanya *listing*, *floating capital* dan ukuran dewan komisaris. Untuk membatasi penelitian, digunakan variabel audit sebagai variabel kontrol.

Gambar 2.1
Model kerangka pemikiran penelitian
Indek pengungkapan *corporate governance* dalam *website* perusahaan



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Ukuran perusahaan

Teori agensi menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar daripada perusahaan kecil (Jensen dan Meckling, 1976). Untuk memperkecil biaya keagenan, perusahaan besar mungkin akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak. Perusahaan besar memiliki sumber daya yang besar. Banyak sumber daya yang tersedia untuk membiayai penyediaan informasi. Penggunaan internet sebagai media informasi akan memberi banyak keuntungan kepada perusahaan. Efisiensi biaya dapat diperoleh perusahaan besar, mengingat besarnya informasi yang harus diungkapkan perusahaan.

Sebaliknya, perusahaan dengan sumber daya yang kecil mungkin tidak memiliki cukup banyak informasi sehingga perlu ada tambahan biaya yang relatif besar untuk dapat melakukan pengungkapan selengkap yang dilakukan oleh perusahaan besar. Perusahaan kecil umumnya berada pada situasi persaingan yang ketat dengan perusahaan lain. Mengungkapkan terlalu banyak tentang jati dirinya kepada pihak eksternal dapat membahayakan posisinya dalam persaingan, sehingga perusahaan kecil cenderung untuk tidak melakukan pengungkapan selengkap perusahaan besar (Singhvi dan Desai dalam Marwata, 2001).

Berdasarkan ulasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Terdapat perbedaan tingkat pengungkapan *corporate governance* dalam *website* perusahaan pada ukuran perusahaan yang berbeda.

2.4.2 *Return on equity* (ROE)

ROE digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian perusahaan atau efektivitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan menggunakan

ekuitas yang dimiliki perusahaan. ROE yang lebih tinggi menggambarkan kinerja perusahaan yang baik. Sayogo (2006) menjelaskan bahwa manajer akan memperoleh insentif yang lebih tinggi ketika dapat memberikan informasi yang baik mengenai perkembangan perusahaan. Jika manajer tidak mampu menyediakan informasi terutama terkait profitabilitas perusahaan, maka investor akan menganggap ini sebagai berita yang buruk dan akan mempengaruhi penilaian terhadap saham perusahaan (Land and Lundholm, 1993 dalam sayogo, 2006).

Saat kinerja perusahaan dalam kondisi baik, perusahaan akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak untuk menunjukkan keberhasilannya. Disamping itu, perusahaan dengan performa yang baik mempunyai dana yang berlebih untuk membiayai penyediaan informasi. *Website* perusahaan diasumsikan akan lebih *update* saat perusahaan dalam kondisi yang baik. Sebaliknya, perusahaan yang dalam kondisi yang kurang sehat, akan membatasi informasi yang diberikan kepada publik.

Berdasarkan ulasan diatas, dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut:

H2: Terdapat perbedaan tingkat pengungkapan *corporate governance* dalam *website* perusahaan pada tingkat ROE yang berbeda.

2.4.3 Lamanya *listing*

Lamanya *listing* menunjukkan jumlah tahun perusahaan yang diperdagangkan secara terus menerus di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan yang baru melakukan *listing* akan memiliki insentif untuk mengungkapkan informasi lebih banyak untuk memerangi skeptisisme dan meningkatkan kepercayaan investor (Haniffa dan Cooke, 2002). Perusahaan yang baru memasuki pasar

terbuka akan berusaha untuk mendapatkan perhatian publik. Salah satu cara adalah dengan melakukan kebijakan aktif dengan mengungkapkan informasi yang lebih banyak. Sehingga perusahaan yang baru *listing* akan mengungkapkan *corporate governance* dengan lebih banyak.

Salah satu media yang dipilih adalah media internet terutama *website*. *Website* dipilih karena merupakan sarana yang efektif. Perusahaan yang baru saja melakukan *listing* kurang begitu dikenal oleh para investor. Sehingga agar para investor tertarik, perusahaan tersebut melakukan pengungkapan-pengungkapan tentang informasi yang berkaitan dengan perusahaan yang bersifat baik.

Dari ulasan tersebut dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut:

H3: Terdapat perbedaan tingkat pengungkapan *corporate governance* dalam *website* perusahaan pada tingkat lamanya *listing* yang berbeda.

2.4.4 *Floating capital*

Masalah yang sering terjadi dalam kepemilikan besar, yaitu adanya *free rider* dapat dihindari (Grossman dan Hart, 1980). Jika sebuah perusahaan yang dimiliki sangat tersebar, tidak ada pemegang saham individu akan memiliki insentif untuk mengawasi perilaku para eksekutif sehingga mendorong perusahaan menerapkan kebijakan aktif. Dalam hal pengungkapan *corporate governance* perusahaan, seperti yang diperkirakan oleh teori keagenan (Leftwich et al, 1981 dalam Raffournier, 1995 dalam Gandia, 2008), kebijakan aktif perusahaan dapat berkontribusi untuk mengurangi biaya pengawasan bagi pemegang saham kecil

dan dengan cara ini akan menguntungkan kepentingan mereka dalam pengembangan bisnis.

Dari ulasan tersebut dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut:

H4: Terdapat perbedaan tingkat pengungkapan *corporate governance* dalam *website* perusahaan pada tingkat *floating capital* yang berbeda.

2.4.5 Ukuran dewan Komisaris

Jumlah dewan yang optimal tergantung pada tingkat efisiensi mereka dalam pemenuhan fungsi pengawasan. Tetapi, konsentrasi posisi dewan komisaris dapat menyebabkan kurangnya transparansi (Gandia, 2008). Dengan jumlah anggota dewan komisaris yang besar, meskipun meningkatkan kapasitas pengawasan, tetapi dapat merugikan perusahaan dengan memperpanjang proses pengambilan keputusan dan prosedur komunikasi (Jensen, 1993).

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada dewan direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance* (KNKG, 2006). Sehingga besarnya dewan akan meningkatkan pengungkapan *corporate governance* baik secara tradisional (annual report) maupun pengungkapan dengan internet.

Dari ulasan tersebut dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut:

H5: Terdapat perbedaan tingkat pengungkapan *corporate governance* dalam *website* perusahaan pada tingkat ukuran dewan komisaris yang berbeda.

2.4.6. Ukuran Auditor

Ukuran auditor merupakan besaran Kantor Akuntan Publik yang jasanya digunakan oleh perusahaan. Meskipun belum terdapat aturan yang mengatur bahwa pengungkapan *corporate governance* melalui sarana *website* harus diaudit, namun pengungkapan informasi *mandatory* melalui *annual report* dan laporan keuangan juga termasuk dalam item yang harus diungkapkan dalam pengungkapan melalui media *website*. Menurut Becker (1998) dalam Bernadi (2009) bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP yang berukuran besar akan menyajikan laporan keuangan yang lebih berkualitas berdasarkan berdasarkan regulasi yang telah ditentukan, karena memiliki kualitas, reputasi dan kredibilitas lebih dibandingkan KAP ukuran kecil. Sehingga diharapkan kualitas pengungkapan yang dilakukan melalui media *website* sebanding dengan kualitas pengungkapan melalui *annual report* dan laporan keuangan.

Untuk mengukur besar kecilnya KAP, maka menggunakan pembeda antara perusahaan yang menggunakan jasa KAP yang termasuk dalam *Big Four* dan perusahaan yang menggunakan jasa auditor *non-Big Four*. Pengukuran dilakukan dengan variabel dummy yaitu 1 jika perusahaan diaudit oleh KAP *Big Four*. Sedangkan 0 jika perusahaan diaudit oleh KAP *non Big Four* (Gandia, 2008; Bernadi, 2009).

H6: Terdapat perbedaan tingkat pengungkapan *corporate governance* dalam *website* perusahaan pada tipe auditor yang berbeda.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deduktif. Penelitian deduktif bertujuan untuk menguji hipotesis dengan validitas teori yang bersangkutan atau pengujian menggunakan aplikasi terhadap teori tertentu. Penelitian ini menguji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *corporate governance* berbasis internet oleh perusahaan-perusahaan publik. Sehingga sampel yang diambil menggunakan data perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen (Y) terdiri dari:

Y yaitu indeks pengungkapan *Corporate Governance* dalam *website* perusahaan

Variabel Independen (X)

Variabel independen (X) terdiri dari ukuran perusahaan (X_1), ROE (X_2), Lamanya *listing* (X_3), *floating capital* (X_4), ukuran dewan direksi (X_5), audit (X_6).

3.1.2 Definisi Operasional

3.1.2.1 Variabel Dependen

Definisi operasional variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Indeks Pengungkapan *Corporate governance* dalam *website* perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan *corporate governance* pada *website* perusahaan. Sebuah indeks pengungkapan dibentuk sebagai standar untuk mengukur tingkat pengungkapan *corporate governance* pada perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penentuan indeks pengungkapan ini berdasarkan pada informasi yang diungkapkan oleh perusahaan dalam *website* mereka bagi *stakeholders*.

Dalam menentukan tingkat pengungkapan *corporate governance* di *website* perusahaan menggunakan item yang terdapat dalam penelitian Gandia (2008). Item yang harus diungkapkan meliputi pengungkapan tentang dewan komisaris, rapat umum pemegang saham, struktur kepemilikan, dan informasi lain tentang *corporate governance*. Item-item tersebut telah disesuaikan dengan keadaan yang ada di Indonesia. Sehingga terdapat item-item yang dihapus karena tidak dapat diterapkan dengan ketentuan yang ada di Indonesia. Terdapat 28 pertanyaan untuk menguji tingkat pengungkapan *corporate governance* yang disajikan perusahaan. Jika perusahaan mengungkapkan maka diberi nilai 1 (satu) dan jika tidak 0 (nol).

Berdasarkan penelitian Gandia (2008), indeks pengungkapan *corporate governance* pada laporan tahunan perusahaan dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$CGI = \frac{\sum x_{ij}}{n_j}$$

Dimana:

CGI : indeks pengungkapan GCG perusahaan j

n_j : jumlah *item* untuk perusahaan j

n_j : 28 *item*

X_{ij} : 1 = jika *item* i diungkapkan; 0 = jika *item* i tidak diungkapkan.

3.1.2.2 Variabel Independen

1. Ukuran Perusahaan (*Size*)

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya kekayaan yang dimiliki perusahaan. Ukuran besaran perusahaan diukur berdasarkan dari total aset pada akhir tahun 2010. Pengukuran ini dilakukan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rini (2010), Marwata (2000), Yularto dan Chariri (2003), Almilia dan Retrinasari (2007) dan Gandia (2008).

Dalam penelitian ini, untuk menilai ukuran perusahaan sampel akan diklasifikasikan menjadi perusahaan besar dan perusahaan kecil. Klasifikasi yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya perusahaan menggunakan rata-rata total aset seluruh perusahaan sampel. Perusahaan yang jumlah asetnya lebih besar dibandingkan rata-rata aset perusahaan sampel tergolong dalam perusahaan besar. Sedangkan perusahaan yang jumlah asetnya lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata aset perusahaan sampel termasuk dalam perusahaan kecil. Penilaian serupa pernah dilakukan oleh Sonnier dan Carson (2009) dalam Efandiana (2011). Perusahaan besar diberi kode “1” dan perusahaan kecil akan diberi kode “0”.

2. *Return On Equity (ROE)*

REO menunjukkan profitabilitas perusahaan atau imbalan hasil dari hasil ekuitas pada perusahaan publik tahun 2010. ROE diperoleh dari laba bersih dibandingkan dengan total ekuitas perusahaan (Gandia, 2008; Bernadi, 2009). Perusahaan akan digolongkan menjadi perusahaan yang mengalami kerugian, perusahaan dengan profitabilitas dibawah rata-rata dan perusahaan dengan profitabilitas diatas rata-rata. Perusahaan yang mengalami kerugian diberi kode “1”, perusahaan dengan profitabilitas dibawah rata-rata diberi kode “2”, sedangkan perusahaan dengan profitabilitas diatas rata-rata diberi kode “3”.

3. *Lamanya Listing (Age)*

Lamanya *listing* menunjukkan jumlah tahun perusahaan yang diperdagangkan secara terus menerus di Bursa Efek Indonesia. Lamanya listing diukur dari selisih tahun sampel dengan tahun *first issues* (Marwata: 2000; Yularto dan Chariri: 2004; Gandia:2008; Rini: 2010).

Sampel perusahaan akan diklasifikasi menjadi perusahaan matang dan perusahaan baru. Pengklasifikasian sampel dilakukan sesuai dengan penelitian Sonnier dan Carson (2009) dalam Efandiana (2011). Perusahaan dengan lamanya listing lebih dari rata-rata lamanya *listing* perusahaan sampel digolongkan dalam perusahaan matang. Sedangkan perusahaan dengan lamanya listing lebih kecil dibandingkan lamanya listing perusahaan sampel digolongkan dalam perusahaan baru. Perusahaan baru akan diberi kode “0” dan perusahaan matang akan diberi kode “1”.

4. *Floating Capital (Capital)*

Floating capital menggambarkan persebaran saham yang perusahaan. Jumlah floating capital yang besar menunjukkan bahwa saham perusahaan sangat tersebar. Variabel ini dihitung dengan melihat seberapa besar proporsi saham yang dimiliki oleh pemilik saham kurang dari 5% (Gandia, 2008; Rini, 2010).

Perusahaan akan digolongkan dalam perusahaan dengan *non controlling interest (NCI)* yang pasif, perusahaan dengan *non controlling interest* aktif, dan perusahaan dengan *non controlling interest* sebagai pengendali. Perusahaan dengan *non controlling interest* pasif merupakan perusahaan dengan floating capital dibawah 20%. Perusahaan dengan *non controlling interest* aktif adalah perusahaan dengan floating capital antara 20% - 50%. Sedangkan perusahaan dengan floating capital lebih dari 50% termasuk dalam perusahaan dengan NCI sebagai pengendali.

5. Ukuran Dewan Komisaris (Komisaris)

Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris (Beiner, dkk, 2003 dalam Ujianto, 2007). Dewan komisaris bertanggung jawab dan berwenang memberi nasihat kepada manajemen jika dipandang perlu oleh dewan komisaris (KNKG, 2004). Ukuran dewan komisaris dihitung dengan menjumlah anggota dewan komisaris perusahaan pada akhir tahun 2010 (Ujianto, 2007; Gandia, 2008; Rini, 2010).

Jumlah dewan komisaris yang optimal tergantung pada tingkat efisiensi fungsi dewan komisaris tersebut. Jumlah dewan yang kecil akan mengurangi

tingkat pengawasan sedangkan jumlah dewan komisaris yang terlalu besar akan menyebabkan pengambilan keputusan yang lama sehingga kurang efisien. Oleh karena itu, perusahaan sampel akan digolongkan menjadi perusahaan dengan jumlah dewan komisari kurang efisien, cukup efisien, dan efisien. Perusahaan dengan jumlah dewan komisaris 2, 3, 9, dan 10 termasuk kurang efisien. Jumlah dewan komisaris 4 dan 8 termasuk cukup efisien, sedangkan jumlah dewan komisaris 5, 6, dan 7 termasuk efisien.

6. Auditor

Untuk mengukur besar kecilnya KAP, maka menggunakan pembeda antara perusahaan yang menggunakan jasa KAP yang termasuk dalam *Big Four* dan perusahaan yang menggunakan jasa auditor *non-Big Four*. Pengukuran dilakukan dengan variabel dummy yaitu 1 jika perusahaan diaudit oleh KAP *Big Four*. Sedangkan 0 jika perusahaan diaudit oleh KAP *non Big Four* (Gandia, 2008; Bernadi, 2009).

Tabel 3.1

Definisi Operasional

No.	Variabel Penelitian	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran
1.	Pengungkapan Corporate Governance	Jumlah item yang diungkapkan / jumlah item yang diharapkan (maksimal)	$CGI = \sum ij / 28$	Rasio
2.	Ukuran Perusahaan	Jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan pada	Perusahaan dengan total aset diatas rata-rata total aset perusahaan	Ordinal 1=perusahaan besar

		akhir tahun 2010	sampel termasuk perusahaan besar. Perusahaan dengan total aset dibawah rata-rata total aset perusahaan sampel termasuk perusahaan kecil.	0=perusahaan kecil
3.	ROE	Laba bersih / ekuitas pemegang saham pada akhir tahun.	ROE<0 maka perusahaan rugi 0<ROE<rata-rata sampel maka ROE rendah ROE>rata-rata sampel maka ROE tinggi	Ordinal 1=perusahaan rugi 2=perusahaan ROE rendah 3=perusahaan ROE tinggi
4.	Lamanya <i>listing</i>	Selisih tahun penelitian dengan tahun pertama IPO	Perusahaan dengan lama listing lebih besar dibanding rata-rata lama listing sampel tergolong perusahaan matang Perusahaan dengan lama listing lebih kecil dibanding rata-rata lama listing sampel tergolong perusahaan baru	Ordinal 1=perusahaan matang 0=perusahaan baru
5.	<i>Floating capital</i>	Saham yang dimiliki oleh pemegang saham <i>non-control</i> (dibawah 5%)	Float<20% maka kepemilikan pasif 20%<Float<50% maka kepemilikan aktif Float>50% maka kepemilikan pengandali	Ordinal 1=kepemilikan pasif 2=kepemilikan aktif 3=kepemilikan pengendali
6.	Ukuran dewan komisaris	Jumlah dewan komisaris perusahaan	Jumlah dewan 2,3,9,10 maka kurang efisien Jumlah dewan 4 dan 8 maka cukup efisien	Ordinal 1=kurang efisien 2=cukup

7.	Auditor	KAP yang digunakan perusahaan	Jumlah dewan 5,6,7 maka efisien KAP <i>Big four</i> dan KAP <i>non Big Four</i>	efisien 3=efisien Ordinal 1= <i>Big four</i> 0= non <i>Big Four</i>
----	---------	-------------------------------	--	---

Sumber: Data diolah tahun 2011

3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup semua perusahaan publik yang *listing* di Bursa Efek Indonesia selama 2010. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan publik yang bergerak di bidang non-keuangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia . Hal ini dikarenakan perusahaan keuangan mempunyai aturan yang berbeda tentang pengungkapan *corporate governance*.

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu dimana umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian. Adapun kriteria-kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010.

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 berjumlah 423 perusahaan. Data perusahaan tahun 2010 dianggap data yang paling *update* sehingga dapat merefleksikan kondisi terkini dari suatu perusahaan.

2. Bukan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan.
Perusahaan keuangan mempunyai ketaatan yang berbeda dengan perusahaan non keuangan. Disamping itu terdapat variabel yang membutuhkan penilaian yang berbeda.
3. Perusahaan yang mempunyai *website* dan menggunakan *website* untuk pelaporan *corporate governance*.
Internet merupakan sarana yang efektif untuk melakukan pengungkapan. Sehingga dibutuhkan perusahaan yang telah mempunyai *website* untuk meneliti tingkat pengungkapan *corporate governance* di internet.
4. Menerbitkan laporan keuangan lengkap selama tahun 2010.
Laporan keuangan (*financial report*) merupakan salah satu sarana untuk data posisi keuangan perusahaan. Sehingga penilaian pengungkapan *corporate governance* dalam *financial report* dapat dilakukan jika perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan tersebut.
5. Laporan keuangan dinyatakan dalam rupiah.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari eksternal yang umumnya disusun oleh suatu entitas selain peneliti dari organisasi yang bersangkutan. Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan dari

perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 dan dari *website* perusahaan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi yang merupakan teknik pengambilan data dengan cara mencari dan mengumpulkan data yang diperoleh dari laporan tahunan yang dipublikasikan. Sumber data dapat diperoleh dari www.idx.co.id, *website* perusahaan dan perpustakaan FE UNDIP. Selain itu, untuk menilai tingkat pengungkapan *corporate governance* data diperoleh dari *website* masing-masing perusahaan.

3.5 Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diolah kemudian dianalisis dengan alat statistik sebagai berikut:

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian ini. Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran data yang akan dianalisis (Hartono, 2008). Alat analisis yang digunakan adalah rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum dan minimum. (Ghozali, 2007). Statistik deskriptif menyajikan ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel. Uji statistik deskriptif tersebut dilakukan dengan program SPSS 17.

3.5.2 Uji Kruskal-Wallis

Uji Kruskal-Wallis merupakan salah satu dari statistik non parametrik. Statistik non parametrik digunakan untuk menggantikan uji parametrik ketika asumsi tentang populasi dipertanyakan. Dalam penelitian ini, uji non parametrik digunakan untuk variabel yang berskala ordinal karena tidak dapat menggunakan regresi karena hanya satu tahun penelitian sehingga tidak dapat digunakan untuk memprediksi.

Uji Kruskal-Wallis merupakan analisis yang digunakan untuk menguji hubungan antara satu variabel dependen berskala metrik dengan satu atau lebih variabel independen berskala nonmetrik atau kategorikal. Uji Kruskal-Wallis serupa dengan analisis varians (ANOVA) tetapi uji Kruskal-Wallis tidak memerlukan adanya asumsi distribusi normal (Yamin dan Kurniawan, 2009). Analisis satu arah Kruskal-Wallis berguna untuk menentukan apakah k sampel independen berasal dari populasi yang berbeda.

Hipotesis yang hendak diuji adalah sebagai berikut:

H_0 = tidak terdapat perbedaan tingkat variabel dependen pada tingkat variabel independen yang berbeda.

H_1 = terdapat perbedaan tingkat variabel dependen pada tingkat variabel independen yang berbeda.